

ASESMEN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK REHABILITASI

Agus Darwanta

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika termasuk kategori tindak pidana khusus berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU tersebut menganut *double track system* berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan yang berupa rehabilitasi. Pada kenyataannya, putusan pengadilan sering terjadi perbedaan, terkait sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Oleh karena itu, perlu dikaji asesmen terhadap pecandu narkotika sebagai upaya pemenuhan hak rehabilitasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan bersifat deskriptif analitis terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier dengan membandingkan dan menganalisis putusan-putusan pengadilan kasus penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian ini adalah upaya pemenuhan hak rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam proses persidangan tindak pidana narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya asesmen dan atau keterangan dari pihak dokter, polisi, kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan rehabilitasi. Permohonan rehabilitasi ini dilakukan kepada jaksa (tingkat penuntutan) atau hakim (tingkat pemeriksaan). Apabila penuntut umum tidak mendakwa terdakwa dengan tindakan rehabilitasi maka hakim pun tidak akan memutus tindakan rehabilitasi. Faktor-faktor pertimbangan hakim yang menjadikan hasil asesmen sebagai dasar dalam pemenuhan hak rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana narkotika yang dilakukan dari hasil proses pemeriksaan di pengadilan, sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak.

Kata Kunci : asesmen, putusan pengadilan. tindak pidana narkotika

ASSESSMENT OF DRUG ADMINISTRATION AS AN EFFORT TO FULFILL THE RIGHTS OF REHABILITATION

Agus Darwanta

Abstract

Narcotics abuse and illicit narcotics trafficking are included in the category of special crimes based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The law adheres to a double track system in the form of criminal sanctions and action sanctions in the form of rehabilitation. In fact, there are often differences in court decisions regarding criminal sanctions and action sanctions. Therefore, it is necessary to study the assessment of narcotics addicts as an effort to fulfill the right to rehabilitation. This research is a normative research, and is descriptive analytical in nature of primary, secondary and tertiary legal materials by comparing and analyzing court decisions in narcotics abuse cases. The results of this study are efforts to fulfill the rehabilitation rights for narcotics addicts in the trial process for narcotics crimes according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely the existence of assessments and or statements from doctors, police, prosecutors stating that the defendant needs rehabilitation. This request for rehabilitation is made to the prosecutor (prosecution level) or judge (examination level). If the public prosecutor does not charge the defendant with rehabilitation measures, the judge will not decide on the rehabilitation measures. The judge's consideration factors that make the results of the assessment the basis for fulfilling the rehabilitation rights for narcotics addicts are based on whether or not a narcotic crime has been proven as a result of the examination process in court, before a judge's decision determines whether a person is rehabilitated or not.

Keywords: assessment, court decision. narcotics crime